



**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 11 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PETERNAKAN
DI KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat perdesaan, maka perlu kiranya menetapkan pembangunan kawasan perdesaan yang integratif dan berkesinambungan ;
 - b. bahwa Kabupaten Sumenep memiliki potensi kawasan Peternakan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. bahwa untuk mengembangkan kawasan perdesaan Peternakan di Kabupaten Sumenep diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumenep tentang Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan di Kabupaten Sumenep.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumenep (RPJPD) (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2017 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN PETERNAKAN DI KABUPATEN SUMENEP

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumenep.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan selanjutnya disingkat TKPKP adalah lembaga yang terdiri dari unsur perangkat daerah kabupaten/kota, dan unsur pemerintah desa, yang menyelenggarakan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan tingkat kewenangannya.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut Bappeda adalah perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah pada tingkat Kabupaten.
5. Camat adalah perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah pembangunan antar desa yang dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa melalui pendekatan partisipatif yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Penetapan Kawasan Perdesaan adalah penetapan dua atau lebih desa dalam suatu tema kawasan dengan memperhatikan kegiatan pertanian, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya, tempat permukiman perdesaan, tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan, nilai strategis dan prioritas kawasan, keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten, kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat, keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.
12. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang sebagaimana disingkat RTRW Kabupaten adalah dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen rencana pembangunan desa untuk periode 6 (enam) tahun.
15. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang selanjutnya disebut RPKP adalah dokumen perencanaan jangka menengah (5 tahunan) bagi setiap Kawasan Perdesaan yang ditetapkan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
18. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJMDes dalam waktu 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa di Daerah.
21. Perangkat desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksanaan Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
22. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.

Pasal 2

Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan di Kabupaten Sumenep diselenggarakan berdasarkan prinsip :

- a. penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi pengembangan investasi ;
- b. kepastian hukum tentang jaminan keamanan investasi, kemudahan dan transparansi pengelolaan perizinan usaha melalui pelayanan satu pintu, keharmonisan hubungan investor dengan tenaga kerja, dan keadilan di antara pelaku usaha di hulu dengan di hilir ;
- c. keterpaduan program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan kegiatan pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan ;
- d. peningkatan keterkaitan bisnis yang saling menguntungkan antara pelaku usaha skala besar, dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pemberdayaan masyarakat desa ;
- e. pengutamakan keterkaitan yang saling menguntungkan antar pelaku usaha dan antar kawasan, seperti mengupayakan keterkaitan pengembangan pusat pertumbuhan dengan sentra produksi di kawasan sekitarnya;

- f. pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara optimal dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat ; dan
- g. pengutamakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan dayaguna dan hasilguna industri pengolahan di dalam negeri berbahan baku lokal dengan tujuan ekspor dalam bentuk barang jadi.

Pasal 3

Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan di daerah bertujuan :

- a. meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan dikawasan;
- b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah ;
- c. mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya daerah guna peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, yang berwawasan kelestarian lingkungan; dan
- d. mengurangi kesenjangan sosial dengan pemerataan distribusi pendapatan masyarakat dan mengurangi jumlah kemiskinan melalui pembukaan kesempatan kerja seperti perindustrian padat karya.

BAB II PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN

Pasal 4

Penetapan Fungsi Kawasan melalui penilaian tiga variabel karakteristik lahan, yaitu: kelerengan lapangan, jenis tanah menurut kepekaan terhadap erosi, intensitas hujan harian rata - rata, berdasarkan variabel tersebut dapat dipilih dan ditetapkan untuk dikembangkan menjadi Kawasan Perdesaan Peternakan di Kabupaten Sumenep.

Pasal 5

Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dipilih berdasarkan penetapan lokasi dan potensi yang ada:

- a. Berdasarkan penetapan lokasi meliputi:

KOMODITAS	PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN	
	KECAMATAN	DESA
Peternakan		
a. Sapi	Batang-Batang	
	Dungkek	
	Lenteng	
	Bluto	
	Pragaan	
	Ganding	
	Batuputih	
	Giligenting	
	Gayam	
	Nonggunong	
b. Kambing		
c. Domba		

d. Ayam Gaok

- b. Berdasarkan potensi di Kawasan Perdesaan Peternakan adalah potensi yang ada ditinjau dari dukungan ketersediaan sumberdaya alam yang meliputi sektor dan produk-produk unggulan yang dapat diperbaharui, kesesuaian lahan, dan ketersediaan pencadangan lahan bagi pengembangan investasi, khususnya dalam mendorong industri pengolahan domestik/lokal berbahan baku lokal sebagai potensi penggerak pengembangan perekonomian Kawasan Perdesaan Peternakan secara berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Pemilihan dan penetapan Kawasan Perdesaan Peternakan di Kabupaten Sumenep berdasarkan pada:
- urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - hasil studi kelayakan lokasi; dan
 - kebijakan pengembangan kawasan daerah yang meliputi Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, dan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan.
- (2) Pemilihan dan Penetapan Kawasan Perdesaan Peternakan di Kabupaten Sumenep sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan sinkronisasi kebijakan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Tokoh Masyarakat.
- (3) Penetapan Lokasi dan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipublikasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat dan dunia usaha secara transparan.

BAB III

PENGEMBANGAN KAWASAN DAN RENCANA INDUK

Bagian Kesatu

Pengembangan kawasan

Pasal 7

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan di Kecamatan merupakan bagian dari pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan di Kabupaten.
- (3) Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan di Kabupaten merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan di Provinsi.

Pasal 8

- (1) Pelaku usaha baik skala mikro, kecil, menengah dan besar merupakan pelaku utama pengembangan sektor riil di Kawasan Perdesaan Peternakan.
- (2) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi kegiatan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan oleh Pemerintah Kabupaten diselenggarakan berdasarkan kebijakan pengembangan kawasan yang meliputi :
 - a. Rencana Induk;
 - b. Rencana Pengusahaan;
 - c. Rencana Tindak.
- (2) Penyusunan kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur perguruan tinggi, OPD terkait, lembaga swadaya masyarakat dan lembaga non pemerintah lainnya.

Bagian Kedua Rencana Induk

Pasal 10

Dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumenep.

Pasal 11

Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memuat :

- a. hasil kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagai data dasar; dan
- b. proyeksi arah, skenario, dan tahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan dalam jangka menengah.

Pasal 12

Kajian menyeluruh terhadap semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagai data dasar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, indikasinya, memuat:

- a. potensi Kawasan Perdesaan Peternakan yang terdiri dari:
 - 1) sumber daya alam sektor dan produk unggulan yang terfokus sebagai penggerak perekonomian;
 - 2) sumberdaya manusia dan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan dan pengelolaan pengembangan bisnis; dan
 - 3) sumberdaya prasarana dan sarana pendukung pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan.

- b. kebijakan pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah, dalam rangka sinkronisasi dan keterpaduan kebijakan pengelolaan kawasan;
- c. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah, dalam rangka konsistensi penerapan rencana tata ruang wilayah;
- d. faktor penghambat dan peluang dalam pengembangan sektor dan produk unggulan; dan
- e. peluang kerja sama antar wilayah terkait dengan semua aspek kunci Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan.

Pasal 13

Proyeksi arah, scenario dan tahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan dalam jangka menengah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan dalam jangka lima tahunan, yang dibagi ke dalam pencapaian sasaran kuantitatif dan kualitatif setiap tahun;
- b. setiapsasaran kuantitatif dan kualitatif per lima tahunan, disertai dengan indikator keberhasilan dan tolok ukur pengembangan sektor dan produk unggulan secara terfokus, dan pengembangan semua aspek kunci di Kawasan Perdesaan Peternakan; dan
- c. strategi, arah kebijakan, dan pentahapan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan dikaitkan dengan upaya mendorong pembangunan daerah tertinggal dan di sekitarnya.

Bagian Ketiga **Rencana Pengusahaan dan Rencana Tindak**

Pasal 14

- (1) Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan Peternakan disusun dengan mengacu pada Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a.
- (2) Penyusunan Rencana Pengusahaan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 15

- (1) Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan disusun dengan mengacu pada :
 - a. Rencana Induk; dan
 - b. Rencana Pengusahaan.
- (2) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun.
- (3) Penyusunan Rencana Tindak Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara terpadu melalui proses Focus Group Discussion (FGD).

Bagian Keempat
Pengelolaan Kawasan Perdesaan Peternakan

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan perdesaan Peternakan meliputi :
 - a. pembangunan infrastruktur atau prasarana dasar yang relatif memadai seperti jalan, jembatan, air bersih, listrik, bahan bakar, dan telekomunikasi;
 - b. sarana penunjang seperti alat angkutan/transportasi, gudang, pendingin (*coldstorage*), peralatan pengolahan dan distribusi sesuai kebutuhan pengembangan bisnis sektor dan produk unggulan di Kawasan Perdesaan Peternakan.
- (2) Pengelolaan Kawasan Perdesaan Peternakan, serta pengelolaan bisnis sektor dan produk unggulan Kawasan Perdesaan Peternakan, yang didukung dengan sistem dan mekanisme pengelolaan pembangunan tahunan secara hirarkhi fungsional mulai dari tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (3) Pengelolaan kawasan perdesaan Peternakan harus didukung oleh tenaga kerja terampil dan terdidik dalam mengelola bisnis sektor dan produk unggulan.

BAB IV
KERJASAMA PENGEMBANGAN KAWASAN

Pasal 17

- (1) Penyusunan Rencana Induk, Rencana Pengusahaan, Rencana Tindak, dan pengelolaan kawasan Perdesaan Peternakan, dapat dilakukan dengan kerjasama antar pemerintah Kabupaten dan lembaga lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur perguruan tinggi, pelaku usaha sektor dan produk unggulan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga non pemerintah lainnya.

BAB V
KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP).
- (2) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. mengkoordinasikan penetapan kawasan perdesaan;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan;
 - c. menunjuk pelaksana pembangunan kawasan perdesaan; dan
 - d. melaksanakan arahan kebijakan sebagai hasil evaluasi laporan kinerja pembangunan kawasan perdesaan.

- (4) Unsur pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Ekonomi, Pembangunan serta Organisasi Perangkat Daerah yang terkait.
- (5) TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (6) Jumlah keanggotaan TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.
- (7) Selain lembaga penyelenggaraan dimaksud pada ayat (1) didukung oleh lembaga lainnya baik lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah.

Pasal 19

Lembaga pelaksana pengembangan kawasan perdesaan Peternakan di kawasan yang telah ditetapkan dilakukan oleh lembaga usaha ekonomi, sosial, kelompok tani dan lembaga lainnya sesuai kebutuhan

BAB VI MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan melalui OPD terkait.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 21

- (1) Bupati melalui OPD terkait melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui fasilitasi kegiatan koordinasi, sinkronisasi, konsultasi, dan sinergitas program antar sektor dan antar pelaku usaha.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Peternakan bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Sumenep;
- d. Dana Desa; dan
- e. Sumber lainnya yang sah.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal **02 APR 2018**

BUPATI SUMENEP



Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si